



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Gender dan Ideologi Maskulinitas pada periode Pasca MOU Helsinki Aceh

Sait Abdullah

STIA LAN Bandung

E-mail: sait.abdullah@stialanbandung.ac.id

Abstrak

Proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai akibat dari perjanjian damai (MOU) Helsinki telah memicu munculnya elit politik lokal baru khususnya dari kalangan mantan komandan GAM. Sejumlah peneliti telah mengaitkan kemunculan elit baru ini dengan konflik antar elite lokal akan alokasi sumber daya ekonomi. Namun apa yang menjadi gap penelitian ini khususnya aspek yang tidak dikaji dalam penelitian-penelitian mereka sebelumnya adalah tentang dimensi gender kritis terhadap dominasi mantan komandan GAM yang terwakili oleh lembaga, KPA (Komisi Peralihan Aceh). Argumen dari makalah ini adalah dalam situasi damai pasca konflik, mantan komandan GAM perlu merumuskan kembali status elit mereka, melalui re-konstitusi maskulinitas hegemonik dan ideologi militeristik. Maskulinitas hegemonik adalah sebuah ideologi kekelakian yang melegitimasi kekuasaan dan status mantan komandan atas laki-laki lain (dan perempuan) dalam masyarakat Aceh. Maskulinitas hegemonik ini ditopang oleh ideologi militeristik yang dipertahankan yang pada akhirnya memperkuat status sosial para mantan komandan GAM atas elit sipil GAM serta para mantan kombatan lainnya. **Kata Kunci:** Agency theory, government governance, besaran institusi, kinerja, *Indonesia Government Index (IGI)*, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci: Gender, Maskulinitas, elite, dan kekuasaan

Gender and Ideology of Masculinity in the Post-MOU Helsinki Aceh period

Abstract

The process of demobilisation and reintegration of ex-combatants of the Free Aceh Movement (GAM) as a result of the Helsinki Peace Agreement (MOU) has triggered the emergence of a new local political elite, especially from among former GAM commanders. A number of researchers have linked the emergence of this new elite with conflicts among local elites over the allocation of economic resources. However, the gaps in this research, particularly the aspects which is not examined in their previous studies, is the critical gender dimension to the dominance of former GAM commanders represented by the agency, KPA (Aceh Transition Commission). The argument of this paper is that in a post-conflict situation, former GAM commanders need to reformulate their elite status, through the re-constitution of hegemonic masculinity and militaristic ideology. Hegemonic masculinity is an ideology of maleness that legitimates the power and status of former commanders over other men (and women) in Acehnese society. The hegemonic masculinity is underpinned by militaristic ideology which ultimately strengthens the social status of former GAM commanders over the GAM civilian lite and other former combatants.

Keywords : Gender, Masculinity, elite, and power

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Proses perundingan damai Helsinki pada tahun 2005 yang diikuti oleh paket perlucutan senjata, proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan telah mentransformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan pemberontakan bersenjata ke arah organisasi politik. Khususnya proses demobilisasi GAM telah menghasilkan dua lembaga GAM baru yang kuat secara politis yaitu, Majelis Nasional dan KPA, dua organisasi GAM memiliki karakteristik yang berbeda. Majelis terdiri dari kelompok para elit politik intelektual sipil (Blok GAM Swedia) dan KPA, yang terdiri dari kelompok komandan militer GAM. Dalam konteks dinamika sosial dan politik intra-elit GAM saat ini, para mantan komandan tidak bisa lagi hanya mengandalkan status kepemimpinan an sich sebagai pemimpin atau komandan GAM. Mereka harus merumuskan kembali dan menegosiasikan ulang status elit mereka. Dalam hal ini, mantan komandan GAM harus berjuang untuk mendefinisikan kembali maskulinitas mereka melalui ideologi militer yang dipertahankan yang nantinya akan memberi mereka status yang lebih tinggi dan terhormat atas elit sipil GAM lainnya dan mantan pejuang atau kombatan GAM.

Makalah ini menjelaskan tentang kemunculan elit baru di tingkat lokal khususnya di Aceh pasca MOU Helsinki. Kemunculan elit baru ini dibentuk melalui usaha bagaimana para mantan komandan GAM merekonstruksi maskulinitas hegemonik dan ideologi militeristik dalam institusi GAM yang baru yaitu Komisi Peralihan Aceh (KPA). Maskulinitas hegemonik adalah sebuah ideologi gender tentang kelelakian yang melegitimasi kekuasaan dan status mantan kombatan dalam masyarakat Aceh. Faktor maskulinitas hegemonik ini sangatlah penting untuk dikaji mengingat implikasi yang begitu luas dalam hubungan kekuasaan khususnya dalam hal rekonstruksi hirarki sosial dan ketidaksetaraan gender diantara mantan elit GAM dan mantan pasukan kombatan GAM dalam masa kembalinya mereka ke dalam era pasca konflik Aceh.

Secara teoritis, konsep maskulinitas hegemonik pada dasarnya berasal dari gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni dalam analisis kelasnya (class analysis) (Connell 1987, 1995, Carrigan, Connell dan Lee 1987, Donaldson 1993, Hearn 2004 dan Howson 2006). Konsep hegemoni Gramscian ini telah digunakan secara luas oleh sejumlah sarjana yang beraliran gender kritis untuk menjelaskan nuansa yang lebih luas dari dinamika sosial dan politik dari hubungan kekuasaan struktur gender. Hegemoni sebagaimana dipahami oleh para sarjana di atas adalah paket strategis dan taktik untuk dominasi dan kontrol yang sah dilakukan oleh kelompok tertentu yang kuat atas orang lain dalam waktu dan keadaan tertentu (Carrigan, Connell dan Lee 1987, Connell 1995, Donaldson 1993, Hearn 2004 dan Howson 2006).

Dibingkai dalam relasi kekuasaan gender, Connell telah mengembangkan konsep maskulinitas hegemonik ini (1987, 1995). Bagi Connell, maskulinitas hegemonik bukanlah jenis karakter yang tetap (traits) atau peran-peran gender yang dimainkan (performance) oleh sekelompok aktor, tetapi lebih merupakan konfigurasi yang cair dari relasi kuasa gender khususnya terkait dengan bagaimana suatu kelompok dominan menempati posisi maskulinitas mereka di atas kelompok lain. Maskulinitas hegemonik menurutnya, selalu berkaitan dengan upaya pengesahan posisi dominan laki-laki dalam tatanan gender patriarki, yaitu, sebuah sistem yang pada gilirannya menghasilkan hierarki gender dan ketidaksetaraan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan laki-laki dengan perempuan (Connell 1995).

Lebih lanjut, Donaldson (1993) secara khusus telah mempertajam konsep maskulinitas hegemonik dari Connell (1987, 1995). Menurut Donaldson (1993), meskipun tidak semua laki-laki sesuai dengan bentuk kejantanan yang ideal dalam kehidupan sehari-hari mereka, maskulinitas hegemonik adalah cita-cita kejayaan kelelakian di mana kekuasaan berada dalam stabilisasi 'struktur dominasi' dan penindasan dalam tatanan gender secara keseluruhan'. Apa yang membuat maskulinitas begitu hegemonik terutama disebabkan oleh prinsip-prinsip,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

nilai-nilai dan kepercayaan pada pria dan maskulinitas sebagai pengatur tatanan gender yang harus dipertahankan dan ditaati oleh mayoritas orang (Carrigan, Connell dan Lee 1987, Donaldson 1993, dan Howson 2006).

Maskulinitas hegemonik adalah apa yang dikatakan Carrigan, Connell dan Lee (1987, 94) sebagai 'korporasi besar'. Bagi yang dominan untuk menggunakan kekuasaan mereka atas kelompok yang didominasi, mereka harus menginvestasikan sejumlah besar upaya termasuk manuver strategis dan manipulasi dalam membangun kekuasaan gender mereka melalui institusi, peraturan, media, politik, pendidikan yang mengartikulasikan nilai dan keyakinan tertentu yang mengekspresikan minat mereka dengan mengorbankan yang lain (Howson 2006). "Hegemoni selalu mengacu pada situasi historis, serangkaian keadaan di mana kekuasaan dimenangkan dan dipegang" (Carrigan, Connell dan Lee 1987, 94). Maskulinitas hegemonik dalam pengertian ini adalah tentang 'bagaimana kelompok-kelompok laki-laki tertentu memiliki posisi kekuasaan dan kekayaan dan bagaimana mereka melegitimasi dan mereproduksi hubungan sosial yang menghasilkan dominasi mereka '(Carrigan, Connell, dan Lee 1987, 92). Secara ideologis, maskulinitas hegemonik diwujudkan dalam ideal budaya dan kekuatan institusional dan dicapai melalui persetujuan dan persuasi (Connell, 2005, Connell dan Messerschmidt, Hooper 2001).

Mengikuti konsep Carrigan, Connell dan Lee (1987), Donaldson (1993) maskulinitas hegemoni dalam penelitian ini didefinisikan sebagai bagaimana para elit mantan komandan GAM menggunakan kekuatan dan status mereka dengan melegitimasi idealitas maskulinitas militer di lembaga militer GAM yang baru didirikan (KPA). Dengan demikian dalam dinamika politik kontemporer, mantan komandan elit GAM telah memainkan kekuatan gender mereka melalui ideologi militer yang dipertahankan dengan meningkatkan perbedaan antara 'pejuang' dan 'warga sipil' serta memanipulasi gagasan 'pelindung' versus 'dilindungi' dalam perjuangan mereka

untuk mencapai kekuasaan kekuasaan di pasca konflik Aceh.

Sebelum mengeksplorasi prinsip dualisme dalam militerisme dan maskulinitas, penting untuk dicatat bahwa mantan kombatan GAM bukanlah mereka yang memegang status militer negara resmi dari pemerintah Indonesia. Mereka adalah mantan pejuang GAM yang dikenal sebagai TNA, (Tentara Negara Aceh atau Tentara Negara Aceh). Sebagai hasil dari proses demiliterisasi, mereka diintegrasikan kembali ke dalam lembaga GAM yang baru, KPA, Komisi Peralihan Aceh. Namun, apa yang penting dalam penelitian ini bukanlah kemunculan organisasi KPA yang meniru institusi militer GAM yang lama, namun bagaimana aspek maskulinitas dan ideologi militeristik yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, dan praktik dalam KPA memicu munculnya para elite politik baru dalam situasi pascakonflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang melibatkan studi literatur, wawancara dan penggunaan data sekunder baik seperti data penelitian terdahulu maupun annual report pemerintah Aceh, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan beserta insitusi donor baik dalam maupun luar negeri yang berada di Aceh.

B. PEMBAHASAN

Pada era pasca konflik Aceh, institusi militer GAM telah berubah menjadi lembaga sipil bernama KPA (Komite Peralihan Aceh) namun yang sangat menarik adalah mengapa ideologi militeristiknya masih utuh? Dalam konteks ini, sudah barang tentu ada upaya-upaya strategis dari sekelompok elite mantan komandan GAM agar kekuatan militer selama perang perlu diartikulasikan dan direplikasi kembali dalam situasi pasca konflik. Pentingnya pengaturan politik gender ini adalah untuk membenarkan dan meligitimasi 'siapa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan' sejak pasukan militer Indonesia meninggalkan kekuasaannya selama konflik bersenjata berdarah 30 tahun di tanah rencong.

Dengan demikian pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana maskulinitas militer sebagai warisan perang harus diorganisir kembali dalam konflik

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pasca-Aceh yang baru? Ada dua strategi untuk menghasilkan dan mempertahankan maskulinitas hegemonik dalam pengaturan pasca konflik. Yang pertama adalah menjadikan institusi KPA sebagai replikasi struktur sayap militer GAM lama untuk membangun kembali rasasolidaritas militer yang kuat di bawah 'satu kesatuan komando' (satu komando bersatu di bawah komandan kepala, Muzakir Manaf). Strategi ini sangat penting dalam membuat maskulinitas hegemonik sebagai 'kita' (para pejuang GAM). Oleh karena itu, dikotomi harus diciptakan dengan kuat yang nantinya akan menimbulkan demarkasi status di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Identitas grup harus dihasilkan di dalam kerangka dualitas gender politik, yaitu, perbedaan 'kami' dan 'mereka', 'orang dalam dan' orang luar'. Hierarki di antara laki-laki harus dihasilkan di mana yang satu dianggap superior sementara yang lain lebih inferior atau rendah. Dikotomi gender ini diartikulasikan dalam bentuk politik perbedaan kelompok, 'pejuang' versus 'sipil'. Sementara strategi kedua adalah bagaimana maskulinitas hegemonik harus dipertahankan melalui hubungan gender antara yang 'dilindungi dengan pelindung'.

'Pejuang' versus 'warga sipil'

Sehubungan dengan strategi pertama, di sepanjang garis hierarki militer, mantan komandan elit GAM (panglima tingkat atas, komandan lapangan) berulang kali menggunakan slogan 'urip saree mate sajan' (hidup dan mati bersama), mengekspresikan keterikatan emosional dalam menjaga ikatan sosial dan perasaan persahabatan dari kesatuan yang sama di bawah kelompok Muzakir Manaf (Ketua KPA dan mantan komandan tertinggi GAM). Terlebih lagi dengan menjaga kebersamaan, hidup dan mati dalam satu ideologi militer memerlukan kesetiaan, rantai komando, dan perasaan esprit de-corps yang secara inheren tertanam dalam slogan. Ini juga memerlukan ideologi maskulin yang menghargai hak istimewa laki-laki dalam tatanan gender dan kualitas menjadi 'maskulin' (kekuatan fisik, keberanian, dan kekerasan) sebagai lawan dari 'feminin' (kualitas lemah secara fisik, ketakutan, dan pengecut). Rantai hierarki

komando yang sudah ada di lembaga GAM yang baru (KPA) telah memungkinkan formalisasi ulang jabatan dan pangkat orang-orang militer yang menyerupai organisasi TNA GAM sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menempatkan para komandan lapangan atau orang-orang elit GAM militer pada pangkat teratas sebagai panglima, sedangkan massa adalah mereka yang dibawah sebagai mantan pasukan. Tidak ada uraian pekerjaan yang jelas ditemukan dalam keanggotaan KPA di 'siapa yang melakukan apa' namun mereka mengklaim bahwa pria dan wanita (mantan kombatan wanita atau Pasukan Inong Balee) yang memang bergabung dengan GAM TNA selama konflik adalah semua anggota KPA. Hirarki organisasinya dibentuk mulai dari tingkat provinsi (panglima pusat), kabupaten (panglima wilayah), kecamatan (panglima mukim) dan tingkat desa (panglima sagoe). Dua tingkat atas panglima pusat dan wilayah (provinsi dan kabupaten) diisi oleh orang-orang militer GAM berpangkat tinggi dan sisanya diduduki oleh berpangkat rendah. Dalam struktur ini, tidak ada wanita mantan gerilyawan yang mempertahankan status panglima militer sebagai komandan, namun mereka (pasukan Inong Balee) hanya dikategorikan sebagai pasukan biasa.

Karena hegemoni maskulinitas adalah tentang bagaimana kekuasaan dan status elit mantan komandan dipertahankan melalui ideologi militeristik, persatuan diantara mereka dianggap sangat penting dalam mengartikulasikan kembali gagasan tentang ikatan kekeluargaan melalui struktur organisasi KPA. Elit militer GAM telah berhasil menciptakan KPA sebagai 'pangkalan' bagi para mantan komandan untuk mengkonsolidasikan dan memobilisasi mantan prajuritnya. Ini adalah tempat di mana mantan komandan dapat menggunakan kekuatan mereka sebagai pejabat tinggi memberi pangkat yang memberlakukan penghargaan dan hukuman pada pangkat yang lebih rendah. Meskipun tidak semua mantan gerilyawan memiliki keyakinan yang sama untuk mendapatkan akses ke kekuasaan dan kekayaan mantan komandan mengingat stratifikasi mantan gerilyawan ke dalam tiga kategori sosial yang berbeda: istimewa, tidak istimewa, dan sama

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

sekali diabaikan, para mantan gerilyawan kebanyakan merasa bahwa KPA adalah rumah bagi semua pejuang yang mengabdikan hidup dan mati mereka untuk gerakan GAM. Belum lagi mayoritas mantan kombatan wanita yang diwawancarai dalam penelitian ini meskipun kontribusi mereka selama perang diabaikan oleh komandan mereka, mereka merasa bahwa KPA adalah 'rumah' mereka.

'Pelindung' versus 'dilindungi'

Kedua, alasan 'keamanan' memang selalu diperjuangkan pada awal proses demobilisasi GAM. Untuk menghindari pelanggaran keamanan terhadap perjanjian perdamaian, program reintegrasi ekonomi sangat penting untuk menjaga lingkungan perdamaian di Aceh (Baron 2009). Dalam hal ini, mantan kombatan kembali dalam masyarakat sipil kemudian harus diamankan secara ekonomi dengan memberikan bantuan uang tunai, pekerjaan, tanah untuk diolah dan sarana ekonomi lainnya (MOU Helsinki 2005). Semua tuntutan ini telah diakomodasi oleh otoritas pusat (Badan Reintegrasi Aceh, BRA) dan telah disalurkan melalui jaringan KPA.

Namun beberapa mantan komandan GAM termasuk wakil komandan pusat berulang kali menyatakan bahwa paket reintegrasi yang disalurkan kepada pasukan mereka tidak cukup untuk mendukung beban ekonomi mantan gerilyawan termasuk keluarga mereka. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa tanah yang dijanjikan oleh MOU sangat penting untuk mendukung ekonomi pasukan tetapi itu tidak pernah ada sampai sekarang. Mantan komandan 'khawatir' bahwa masalah ini akan memicu kemarahan dan kekecewaan terhadap mantan pejuang pria mereka dan akan menghasilkan kejahatan terkait kekerasan yang dilakukan oleh mantan kombatan GAM. Dalam masalah khusus ini, mantan komandan mengklaim memiliki kewajiban untuk melindungi setiap kemungkinan yang akan menodai MOU dengan 'mengamankan' atau 'menjinakkan' para mantan kombatan yang akan menghancurkan perdamaian di Aceh. Karenanya 'peringatan keamanan' ini membutuhkan tanggapan segera baik dari pemerintah pusat atau daerah untuk 'melindungi' MOU Helsinki di Aceh. Jika

tidak, mantan gerilyawan akan menjadi makhluk paling berbahaya yang akan menghancurkan pembangunan perdamaian di Aceh. Tetapi apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan 'masalah keamanan' atau 'jenis ancaman potensial'? Apakah perdamaian diperdagangkan atas nama 'keamanan' dan 'ancaman'? Apabila itu yang terjadi maka merek dagang laki-laki militer terutama kekerasan dapat dimainkan demi status mantan komandan dan kekuasaan dalam pemerintahan pasca-konflik politik yang baru di Aceh. Dalam wawancara dengan mantan komandan GAM, mereka mengatakan bahwa fungsi utama komandan adalah untuk 'menjinakkan' para mantan pejuang agar tidak kembali ke kegiatan kriminal. Adapun para komandan yang tahu persis sifat dan kepribadian prajurit mereka, adalah tanggung jawab komandan untuk membina pasukan mereka, mengamankan dan melindungi mereka dari jatuh ke dalam kekerasan.

Meskipun demikian, selama konflik bersenjata, 68% dari insiden kekerasan dan 79% dari kekerasan yang menyebabkan kematian disebabkan oleh eksodus yang merajalela' (Asia Foundation, 2013). Sementara setelah MoU, dua pertiganya disebabkan oleh kejahatan (terkait dengan kekecewaan mantan kombatan) dan jauh lebih umum terkait dengan kekerasan pemilu (Asia Foundation 2013). Misalnya, mengenai kasus-kasus kekerasan pemilihan umum, pada tahun 2012 ketika orang-orang militer (Muzakir Manaf) dan para pemimpin GAM yang diasingkan (Zaini Abdullah) bergabung bersama sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur untuk calon Aceh, ada beberapa insiden kekerasan yang melibatkan pembunuhan, penculikan dan intimidasi terhadap saingan mereka khususnya kelompok Irwandi, persaingan pemilihan gubernur mereka yang kuat (Serambi Indonesia 2012). Kekerasan juga melibatkan pembunuhan warga sipil yang diidentifikasi sebagai pekerja migran Jawa di Aceh Utara dan Banda Aceh pada tahun yang sama (Serambi Indonesia 2012). Hal ini termasuk intimidasi dan teror terhadap para pemimpin partai politik GAM lainnya.

Pada tahun 2012, kekerasan dalam bentuk teror, intimidasi, pembunuhan,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

penyiksaan yang diduga dilakukan oleh mantan kombatan GAM kemungkinan diserap demi kepentingan para mantan komandan pria elit untuk mempertahankan kekuasaan dan status mereka dalam dinamika politik kontemporer untuk menjamin perdamaian di Aceh yang sering terjadi. meningkat selama Pilkada (pemilihan kepala daerah langsung). Sementara itu, insiden kekerasan yang dilakukan oleh mantan gerilyawan terus dilaporkan oleh media (Serambi Indonesia) untuk menyoroiti beberapa kasus kriminal yang melibatkan mantan gerilyawan yang kecewa terhadap para pemimpin mereka (Badrudin pada 2009, Gambit 2011-2014, Kasus Din minimi (2014-2016).

Dalam hal ini, mitos ideologis 'hubungan komandan anak buah atau pelindung dengan yang dilindungi' menjadi kabur atau tidak jelas. Pelindung sebenarnya hanyalah refleksi dari kepentingan mantan komandan dan perjuangan untuk mencapai status ideal maskulin sebagai elit GAM. Ini diartikulasikan dalam cita-cita mantan komandan tentang posisi sebagai 'Bapak' bersama dengan status dan kekuasaan tertinggi mereka di Aceh pada masa pasca konflik. Maskulinitas mantan komandan sebagai top elite ditunjukkan dalam cita-cita agung mereka sebagai penyedia ekonomi pasukan bawahan mereka. Mereka menjadi 'pelindung' secara ekonomi. Menjadi pelindung mencerminkan posisi 'Bapak' sebagai 'Wali' atau 'penyedia ekonomi' di atas mereka bawahan (mantan kombatan pria dan wanita). Tentunya bagi para mantan komandan untuk menyediakan pekerjaan dan sarana ekonomi lainnya untuk meningkatkan mata pencaharian mantan prajurit mereka di tengah-tengah kendala sosial ekonomi yang dihadapi kehidupan para mantan pejuang. Menjadi mantan komandan GAM adalah hadiah sosial, harga diri dan juga status tinggi di pangkat mereka serta di komunitas dan keluarga mereka. Kekuatan ini harus dilestarikan. Sering kali selama wawancara, mantan komandan menyatakan bahwa mereka harus mengambil 'tanggung jawab sosial yang diperluas' untuk melindungi tidak hanya mantan kombatan, tetapi juga keluarga mereka, mantan janda GAM, anak-anak dan anak yatim GAM.

Pelindung maskulin dalam konteks ini sebenarnya bukan tentang bagaimana mantan komandan memposisikan diri sebagai penjaga yang aman dari serangan berbahaya atau bersenjata dan ancaman kekerasan dari musuh luar, tetapi lebih artikulasikan sebagai sebuah cara terbaik para mantan komandan GAM memposisikan diri sebagai 'bos lokal' (menyerupai mantan panglima perang lokal sewaktu konflik bersenjata di mana komandan menikmati ekonomi politik yang diperoleh dari perang berdarah). Sementara selama perang, para komandan dapat menggunakan figur 'kebakakan' mereka dalam hal penyedia ekonomi atau wali dengan berperan sebagai raket perlindungan dari 'bisnis lokal', seperti pembalakan liar, atau pembalakan ilegal terhadap pedagang/pengusaha kecil setempat.

Sementara itu bagi prajurit khususnya mantan kombatan, pencari nafkah maskulin yang ideal sangat penting untuk mendukung keluarga mereka. Itulah sebabnya ciri khas kejantanan di kalangan mantan gerilyawan terwujud dalam upaya mereka mempertahankan dan mencari jaringan perlindungan melalui keterlibatan dalam bisnis dan kekayaan elit untuk mendukung kehidupan mereka. Menjadi laki-laki yang sukses, mantan kombatan dinyatakan dalam kapasitas mereka untuk menjadi kontraktor atau pengusaha yang sukses. Mantan pejuang pria istimewa lainnya di era pasca konflik sedang bersaing dan negosiator bisnis yang baik ('negosiator bisnis yang cakap' adalah mereka yang menerapkan intelijen dan pertempuran taktik militer strategis sebelumnya).

Bagi mantan kombatan yang tidak puas, atau mantan kombatan yang kurang beruntung, status pencari nafkah adalah wajib karena kekuatan tawar-menawar mereka dengan laki-laki lain. Namun, karena kurangnya kapasitas mereka untuk mencapai status sosial yang sama dari pencari nafkah laki-laki dengan rekan-rekan istimewa mereka (seperti bisnis rekanan, komandan yang menguntungkan sari sisi pekerjaan), mereka malah mengungkapkan perasaan negatif seperti rendah diri, kemarahan dan kepahitan kepada mantan komandan mereka. Dalam mengekspresikan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

maskulinitas mereka, kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa menjadi mantan pejuang yang sukses adalah mereka yang berani, tangguh dalam melakukan 'bisnis'. Sementara itu untuk mantan gerilyawan yang benar-benar diabaikan (mereka yang status militernya tidak diakui sebagai pejuang), mereka mengalami kehilangan kekuasaan sebagai laki-laki pencari nafkah dan menyatakan tugas mereka untuk melindungi ketidakamanan ekonomi keluarga sebagian mereka terlibat dalam kekerasan dan kejahatan yang melibatkan senjata.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Secara umum, dalam masyarakat Aceh kontemporer meskipun status pencari nafkah maskulin juga dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara umum tanpa harus selalu terlibat dengan GAM, namun kekuatan GAM terutama sejak kembalinya mantan kombatan GAM ke dalam ekonomi politik sangat menentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paska konflik Aceh, bentuk maskulinitas hegemonik dengan kepentingan kelas telah membuat laki-laki mantan militer menjadi bentuk kekuatan maskulin khusus yang saat ini mencapai posisi dominannya dan paling dihargai baik oleh pria maupun wanita pada umumnya. Menjadi pengusaha yang sukses untuk orang-orang Aceh biasa diartikulasikan dalam cara agar berhasil menghubungkan para mantan pejuang GAM. Dominasi ini muncul karena ekonomi Aceh sangat bergantung pada anggaran pemerintah yang menggunakan uang publik dalam bentuk pengeluaran pemerintah misalnya membeli peralatan resmi, membangun infrastruktur kantor, dan lain-lain. Hampir semua masalah ini terkait dengan GAM karena mereka sudah mengendalikan aliran uang publik di dinas-dinas Pemerintah Aceh. Para mantan komandan atau panglima secara strategis menempati posisi sosial seperti ini dan sekaligus mengambil manfaat ekonomi dan politik pasca konflik. Mengingat hegemoni maskulinitas dicapai melalui perjuangan (Connell dan Messerschmidt 2005), mantan komandan tidak dapat mengerahkan status elit mereka sebagai 'Bapak' kecuali mereka memang menduduki kekuasaan politik lokal

dan posisi otoritas strategis lainnya baik di parlemen, partai politik atau birokrasi sebagai tempat untuk mempertahankan dan melegitimasi maskulinitas hegemonik mereka sebagai pria elit. Hubungan komandan-anak buah atau 'pelindung-dilindungi' secara ideologis dirancang dalam situasi pascakonflik dan telah menjebak hubungan ketergantungan yang melayani kepentingan status dan kekuasaan elit sebagai 'penyedia ekonomi' atau 'wali'. Ironisnya meskipun sebagian besar mantan gerilyawan baik pria maupun wanita masih berpikir bahwa KPA sebagai 'rumah' untuk pejuang dan sebagai 'satu keluarga', mereka mengakui bahwa semua pengaturan politik ini hanya demi mempertahankan bagaimana kelompok mantan komandan itu berdiri tegak dalam kekuasaan politik lokal.

REFERENSI

- Connell, R.W. 1985. "Theorising Gender", *Sociology*, 19 (2): 260-272.
- Connell, R.W. 1987. *Gender and Power, Society, the Person and Sexual Politics*. Cambridge: Polity Press in association with Basil Blackwell
- Connell, R.W. 2005. *Masculinities*. Second Edition. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California.
- Carrigan, Connell and Lee. 1987. *Toward a New Sociology of Masculinity in Harry Brod. The Making of Masculinities The New Men Studies*. Allen & Unwin, Inc. Winchester USA.
- Hutchings, Kimberly. 2008. *Cognitive Short Cuts*. In *Rethinking the Man Question Sex, Gender and Violence in International Relations*. Zed Books Ltd. London.
- Connell R.W. and Messerschmidt 2005. *Hegemonic Masculinity Rethinking the Concept*. *Gender & Society*, Vol. 19. No.6, 829-859. Doi: 10.1177/0891243205278639.
- Enloe Cynthia. 1983. *Does Khaki Become You?*. Pluto Press Limited. London.
- Enloe Cynthia. 1989. *Making Feminist Sense of International Politics Bananas Beaches and Bases*. University of

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- California Press. Berkeley Los Angeles.
- Hearn Jeff 2004. From hegemonic masculinity to the hegemony of men. *Feminist Theory*. Sage Publications. Vol. 5 (1): 49-72. Doi: 10.1177/1464700104040813.
- Donaldson Mike 1993. What is Hegemonic Masculinity?. *Theory and Society* 22: 643-657.
- Memorandum of Understanding (MOU) between The Government of Indonesia and The Free Aceh Movement. 2005. Available at <http://www.ucdp.uu.se/downloads/fullpeace/Ind%20050815.pdf>.
- Hooper, Charlotte. 2001. *Manly States: Masculinities, International Relations and Gender Politics*. New York: Columbia University Press.
- Howson, Richard. 2006. *Challenging Hegemonic Masculinity*. Routledge, New York. USA.
- Serambi Indonesia. 2012. Irwandi Yusuf: Saya di Pukul di Wajah dan Kepala. Available at: <http://www.tribunnews.com/region/2012/06/27/irwandi-yusuf-saya-dipukul-di-wajah-dan-kepala>.
- The Asia Foundation 2013. *The Contested Corners of Asia. Subnational Conflict and International Development Assistance. The case of Aceh*. <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/AcehExecutiveSummary.pdf>. Accessed 13 May 2014.